

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sejenis

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan mengenai *Analisis Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kawimunjawa yang Berkelanjutan (Sustainability Tourism) (Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara)* oleh Noor Nailie Azzat (2018) dengan Teknik Pengumpulan data yaitu dengan cara observasi (pengamatan langsung) di lokasi kegiatan, metode wawancara secara langsung dengan pihak terkait dalam pengembangan industri pariwisata di Karimunjawa. Penelitian tersebut dilakukan dengan Analisa Ekonomi, Analisis Typology Klasten, Analisis Kesenjangan Pendapatan, Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Analisa Hukum dan Lingkungan, Analisis SWOT untuk Strategi Perencanaan Pengembangan Karimunjawa Sebagai Destinasi Pariwisata dapat disimpulkan kawasan Pariwisata Karimunjawa merupakan kawasan yang perkembangan perekonomiannya cepat, pengembangan kawasan pariwisata di Karimunjawa sesuai dengan peraturan daerah yang ada, kawasan Karimunjawa mempunyai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai kawasan budidaya yang dapat digunakan sebagai penunjang pariwisata, prioritas perencanaan pengembangan kawasan pariwisata Karimunjawa yang terbaik adalah perencanaan pengembangan infrastruktur dan perencanaan pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan cara meningkatkan promosi daerah terutama di bidang pariwisata, mempermudah izin usaha pariwisata dan pendukungnya,

pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah, dan pembangunan moda transportasi yang terintegrasi sehingga memudahkan wisatawan untuk masuk dan keluar masuk area wisata, *Kajian Tingkat Kebutuhan Angkutan Pariwisata (BUS) di Daerah Istimewa Yogyakarta* oleh Rini Ekowati (2015) dengan metode penelitian yaitu pengumpulan data primer dan sekunder terkait dengan potensi penumpang dan potensi bangkitan di lokasi pariwisata, dan Penelitian yang dilakukan oleh Agung Nugroho Putra (2015) dengan judul *Stated Preference Kebutuhan Angkutan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Agung melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dan menganalisa data yaitu terkait dengan potensi penumpang dan potensi bangkitan di kawasan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil dari penelitian ini adalah harapan dari responden (wisatawan) mengenai fasilitas yang harus ada di angkutan umum wisata.

2.2. Pengertian Transportasi

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain (Salim dalam Tamin, 2008).

2.3. Pengertian Lalu-Lintas

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan

bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. (Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

2.4. Permasalahan Transportasi

Di Indonesia permasalahan transportasi sudah semakin parah, khususnya di beberapa kota besar seperti DKI-Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Kota yang memiliki penduduk lebih dari 2 – 3 juta jiwa dapat dipastikan mempunyai permasalahan transportasi. Pada akhir tahun 2000, diperkirakan hampir semua ibukota provinsi dan beberapa ibukota kabupaten akan memiliki penduduk diatas 1 – 2 juta jiwa, sehingga permasalahan transportasi tidak bisa dihindarkan. (Tamin, 2008)

2.5. Pengetian Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan)

2.6. Jaringan Lalu Lintas

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan

angkutan jalan. (Undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

2.7. Pengetian Perencanaan Transportasi

Perencanaan transportasi didefinisikan sebagai suatu proses yang tujuannya mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang bergerak atau berpindah tempat dengan aman dan murah. (Pignataro dalam Tamin, 2008)

2.8. Pengertian Angkutan

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. (Undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

2.9. Angkutan Pariwisata

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek). Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :

- a. Menangkut wisatawan;
- b. Pelayanan angkutan dari dan ke arah tujuan wisata;

- c. Tidak masuk terminal;
- d. Pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
- e. Tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
- f. Tidak terjadwal;
- g. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

2.10. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata adalah suatu kawasan tempat terdapat kegiatan pariwisata dan obyek wisata. (Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029)

2.11. Penetapan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Strategi untuk melaksanakan kebijakan penetapan kawasan kepariwisataan yaitu dengan cara (Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029) :

- a. Melestarikan obyek wisata
- b. Memanfaatkan obyek wisata secara bijaksana
- c. Mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya dan
- d. Menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai

2.12. Pengelolaan Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029. Pengelolaan kawasan Pariwisata yaitu dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengatur, membina dan mengawasi pengembangan obyek wisata budaya;
- b. Mengatur, membina dan mengawasi pengembangan obyek wisata berbasis pertanian, industri serta kawasan unggulan wilayah; dan
- c. Mengatur, membina dan mengawasi peningkatan layanan dan fasilitas obyek wisata.

2.13. Letak Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki letak Astronomi Daerah Istimewa Yogyakarta 70 33' LS - 8 12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT., dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Barat Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
- b. Sebelah Barat Laut Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
- c. Sebelah Timur Laut Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
- d. Sebelah Timur Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
- e. Sebelah Selatan Samudera Indonesia.

**2.14. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten
Kulon Progo**

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kulon Progo per Tahun

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju
		2015	2016	2017	Pertumbuhan
1.	Temon	26.255	26.603	26.960	0,81
2.	Wates	47.197	4.821	48.463	0,81
3.	Panjatan	35.633	36.067	36.512	0,70
4.	Galur	30.767	31.081	31.405	0,51
5.	Lendah	38.822	39.282	39.753	0,67
6.	Sentolo	47.676	48.289	49.920	0,77
7.	Pengasih	48.466	49.109	49.768	0,81
8.	Kokap	32.058	32.224	32.396	-0,57
9.	Girimulyo	22.624	22.755	22.891	-0,24
10.	Nanggulan	29.029	29.376	29.731	0,68
11.	Kalibawang	27.736	27.905	2.080	0,10
12.	Samigaluh	25.935	26.171	26.416	0,05
Kulon Progo		412 198	416 683	421 295	0,48

Sumber: BPS Kulon Progo Dalam Angka 2017

2.15. Luas Wilayah Adiminstrasi Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.2. Luas Wilayah Kecamatan pada Kabupaten Kulon Progo

Kecamatan	Luas (Hektar)	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Temon	3.629,890	6,19
2. Wates	3.200,239	5,46
3. Panjatan	4.459,230	7,61
4. Galur	3.291,232	5,61
5. Lendah	3.559,192	6,07
6. Sentolo	5.265,340	8,98
7. Pengasih	6.166,468	10,52
8. Kokap	7.379,950	12,59
9. Girimulyo	5.490,424	9,36
10. Nanggulan	3.960,670	6,76
11. Kalibawang	5.296,368	9,03
12. Samigaluh	6.929,308	11,82
Kulon Progo	58.627,512	100

Sumber: BPS Kulon Progo Dalam Angka 2017

2.16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 (RIPPARDA)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataaan Daerah untuk periode 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2025.

Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam

Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dalam mewujudkan kawasan pariwisata daerah, juga dilengkapi dengan Usaha Pariwisata. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. (RIPPARDA DIY 2012 – 2025)

2.17. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Berdasarkan RIPPARDA 2012 – 2025

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah
- b. pembangunan daya tarik wisata
- c. pembangunan fasilitas umum dan pariwisata
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dan
- f. pembangunan investasi di bidang pariwisata

2.18. Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.3. Jumlah Pengunjung pada Obyek Wisata di Kulon Progo

No.	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung
1.	Temon	Pantai Glagah	375.997
		Pantai Congot	82.838
2.	Galur	Pantai Trisik	13.425
		Waduk Sermo	130.921
3.	Kokap	Wisata Alam Kalibiru	355.498
		Goa Kiskendo	11.456
4.	Girimulyo	Wisata Alam Tritis	2.919
		Puncak Suroloyo	19.816
5.	Samigaluh	Kebun Teh Nglingo	59.061
Jumlah/Total			1.051.931

Sumber: BPS Kulon Progo Dalam Angka 2017

2.19. Kebutuhan Parkir

Kebutuhan parkir adalah keperluan mobil untuk diparkir disebut dengan Kebutuhan Parkir. Apabila jumlah mobil dalam suatu lingkungan atau kota bertambah, begitu-pula dengan kebutuhan ruang parkir. Kebutuh-an akan parkir akan semakin bertambah apabi-la sebagian besar dari mobil tersebut digunakan untuk berpergian sehingga dibutuhkan lebih dari satu unit ruang parkir. (Breithaupt, Oliver Eberz, GTZ, 2011)

2.20. Standar Kebutuhan Satuan Ruang Parkir

Standar kebutuhan luas area kegiatan parkir berbeda antara yang satu dengan yang lain, tergantung kepada beberapa hal antara lain pelayanan, tarif yang diberlakukan, ketersediaan ruang parkir, tingkat kepemilikan kendaraan bermotorm tingkat pendapatan masyarakat. Kebutuhan parkir untuk kawasan pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kebutuhan SRP pada Tempat Rekreasi

Luas Area Total (100 m²)	50	100	150	200	400	800	1600	3200	6400
Kebutuhan (SRP)	103	109	115	1222	146	196	295	494	892

Sumber: Pedoman Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998

Tabel 2.5. Standar Satuan Ruang Parkir Kendaraan

Jenis Kendaraan		Satuan Ruang Parkir (M)
1	a. Mobil Penumpang Golongan I	2,30 x 5,00
	b. Mobil Penumpang Golongan II	2,50 x 5,00
	c. Mobil Penumpang Golongan III	3,00 x 5,00
2	Bus/Truk	3,40 x 12,50
3	Sepeda Motor	0,75 x 2,00

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996

2.21. Manajemen Parkir

Manajemen parkir bisa dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut diantaranya (Breithaupt, Oliver Eberz, GTZ, 2011) :

- a. Menetapkan kantong parkir di lokasi dengan potensi pengunjung yang tinggi
- b. Menetapkan tarif parkir yang terjangkau (smart pricing)
- c. Menetapkan lama waktu parkir
- d. Menerapkan sistem park and ride
- e. Meningkatkan pelayanan angkutan umum
- f. Penerapan standar parkir maksimum bagi gedung-gedung baru
- g. Evaluasi ketersediaan dan kebutuhan fasilitas parkir